

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam bidang teknologi saat ini berjalan begitu pesat, terutama di bidang informasi khususnya internet. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan internet bukanlah menjadi hal yang baru di kalangan masyarakat. Pada kenyataannya hampir setiap kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat dipenuhi melalui platform-platform digital, misalnya dalam berkomunikasi, mengakses berita, belanja *online*, melakukan diskusi hingga memperoleh informasi dari berbagai sumber. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 dari total 264.161.600 penduduk Indonesia, 171.176.716 diantaranya merupakan pengguna internet. Semakin banyaknya pengguna internet yang tersebar di seluruh wilayah menandakan bahwa internet sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi berbagai pihak. Para pemilik *website* atau platform digital pun harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin keberadaan internet tersebut sebagai sarana dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi para pihak. Sedangkan bagi para pihak yang mengakses internet diharapkan dapat sebijak mungkin dalam menggunakannya.

Di era digital ini, internet menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk berbagai pihak, yaitu perorangan, organisasi, perusahaan hingga instansi pemerintah. Bagi instansi pemerintah sendiri, internet dapat bermanfaat terkait

dengan penggunaannya untuk membuat sistem informasi dan juga memberikan kemudahan sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, dengan adanya internet diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyebaran atas informasi yang tersedia, informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan ataupun non-keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentunya didukung oleh aspek transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek-aspek dalam pemerintahan tersebut dilakukan guna mencapai tujuan pemerintah yaitu *good governance*. Menurut United Nation Development Program dalam (Mardiasmo, 2009) karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi, partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategik.

Pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan merupakan salah satu cara strategis yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan maksud tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan penyaluran informasi keuangan melalui penggunaan *website* untuk melaksanakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), tak terkecuali masyarakat. *Internet Financial Reporting* (IFR) menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempublikasikannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat seperti menghemat biaya, dapat diakses oleh semua

pengguna, dan meningkatkan kepedulian pemerintah daerah terhadap *stakeholders* (Government Finance Officers Association, 2009).

Praktek pengungkapan laporan keuangan melalui internet ini sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap penyajian informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna, kecuali informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas. Praktek IFR pada pemerintah daerah juga didorong oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang berisi instruksi kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” dalam *website* resmi pemerintah daerah masing-masing, serta memuat 12 dokumen pengelolaan anggaran dalam *website* tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Transparency International (2018) melalui *Corruption Perceptions Index 2018*, Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara dengan capaian skor 38 dari 100 poin, dimana hal ini menandakan bahwa di Indonesia masih belum mencerminkan pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi guna menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik agar lebih berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan dilaksanakannya sistem pemerintahan yang sudah berbasis

elektronik atau melalui internet menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan *stakeholders*, khususnya masyarakat yang juga ikut mengawasi jalannya kegiatan pemerintahan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga sebagai langkah untuk mewujudkan *good governance*.

Untuk itu peran internet disini sangat dibutuhkan baik bagi pihak pemerintah daerah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil survei 2018 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kontribusi pengguna internet per wilayah didominasi oleh para pengguna internet yang tinggal di Pulau Jawa, yakni menempati urutan pertama dengan persentase 55,7%, kemudian disusul oleh Pulau Sumatera (21,6%), Sulawesi-Maluku-Papua (10,9%), Kalimantan (6,6%), dan Bali-Nusa Tenggara (5,2%). Pada hasil survei tahun 2016 dan 2017, Pulau Jawa juga menduduki urutan pertama pengguna internet menurut wilayah, yaitu masing-masing sebesar 65% dan 58%. Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia, tuntutan terhadap *website* yang berkualitas menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Terutama bagi pemerintah daerah yang membutuhkan sebuah *website*, yang jika dilihat dari segi konten maupun tampilan dapat menarik para pengguna. Hal tersebut penting agar masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki rasa keingintahuan dan ikut memanfaatkan *website* tersebut guna menjalankan proses *e-government* di Indonesia.

Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan secara *online* telah banyak dilakukan, akan tetapi secara umum penelitian tersebut kebanyakan dilakukan pada perusahaan atau sektor

swasta, seperti pada penelitian Soepriyanto & Dustinova (2012), Rozak (2012) Reskino & Sinaga (2016), dan Sayidah et al. (2016). Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan laporan keuangan di internet melalui *website* yang dilakukan pada sektor pemerintah daerah.

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan melalui internet adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah digambarkan dengan total aset, jika ukurannya semakin besar pemerintah juga dituntut untuk dapat mempublikasikan informasi keuangan dengan efektif dan efisien oleh para *stakeholders* tak terkecuali masyarakat. Hasil penelitian Nosihana & Yaya (2016) dan Pratama et al. (2015) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Sedangkan berdasarkan penelitian Setyaningrum & Syafitri (2012) dan Girsang & Yuyetta (2015) ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Faktor kedua yaitu ukuran legislatif. Ukuran legislatif merupakan banyaknya jumlah anggota legislatif (DPRD) yang bertugas mengawasi pemerintah daerah. Karena DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah, maka kehadirannya dinilai sangat penting bagi jalannya kegiatan pemerintahan. DPRD berperan untuk memastikan apakah kegiatan pemerintahan sudah terselenggara dengan baik atau tidak, khususnya mengenai hubungannya dengan pengelolaan anggaran daerah, dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan melalui internet dinilai lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian Laupe et al. (2018) dan Setyaningrum & Syafitri (2012)

menjelaskan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Alhajjriana et al., (2018) jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan melalui internet adalah tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu *stakeholders* bagi pemerintah daerah yang juga harus berperan dalam mengawasi jalannya kegiatan pemerintah daerah. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah untuk menyerap informasi yang diberikan, sehingga memungkinkan pemerintah mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai laporan keuangannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien yaitu melalui internet. Hasil penelitian Dewi & Adi, (2019) dan Laupe et al. (2018) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. Sedangkan menurut penelitian Caba Pérez et al., (2014) menyimpulkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan melalui *website*.

Berdasarkan penjelasan di atas dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih menghasilkan ketidakkonsistenan tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan bukti empiris terbaru mengenai aspek transparansi yang terkandung dalam prinsip *good governance* saat melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan media internet agar mudah diakses oleh publik. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet yang

dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif serta tingkat pendidikan masyarakat.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah daerah dalam memberikan informasi keuangan secara efektif dan efisien bagi para *stakeholders*, salah satu caranya yaitu melalui internet dengan menggunakan *website*. Melakukan pengungkapan laporan keuangan melalui internet (*internet financial reporting*) merupakan cara pemda untuk meyakinkan masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* tentang bagaimana penyelenggaraan aktivitas pemerintahan selama ini, apakah telah berjalan sesuai aturan atau tidak. Apabila praktek *internet financial reporting* ini telah dijalankan dengan baik, maka dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet?
2. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet?
3. Apakah tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan melalui internet telah banyak dilakukan, tetapi pada penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan perusahaan atau sektor swasta sebagai objek penelitiannya. Sedangkan pada penelitian saat ini, peneliti mengambil sampel pada pemerintah kabupaten/ kota di Pulau Jawa. Penelitian ini juga dapat melihat bagaimana penerapan salah satu aspek *good governance* yaitu transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempublikasikan laporan keuangannya melalui internet. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu salah satu variabel independen yang digunakan adalah tingkat pendidikan masyarakat, yang diproxykan dengan rata-rata lama sekolah, peneliti menggunakan variabel ini dikarenakan masih sangat sedikit diteliti oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan selanjutnya terletak pada proxy yang digunakan untuk mengukur variabel dependennya, beberapa penelitian terdahulu hanya mengukur dengan

variabel dummy, sementara pada penelitian ini sesuai dengan *checklist* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012.